



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**RENJA**

**RENCANA KERJA  
TAHUN 2022**

**KECAMATAN RASAU JAYA  
KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Rasau Jaya, Januari 2021  
CAMAT RASAU JAYA  
  
**Dr. SUTOMO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640411 199103 1 011

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I – PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Rasau Jaya .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	39
BAB III – TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	49
3.1.1 Telaah Kebijakan Nasional .....	49
3.1.2 Telaah Kebijakan Provinsi .....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Rasau Jaya .....	62
3.3 Program dan Kegiatan .....	63
BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	74
BAB V – PENUTUP .....	77

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Rasau Jaya, Januari 2021  
CAMAT RASAU JAYA  
  
**Dr. SUTOMO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640411 199103 1 011

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.1 – Evaluasi Renja SKPD Tahun Sebelumnya .....	8
Tabel 2.1.1 – Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 .....	11
Tabel 2.2.1 – Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Rasau Jaya .....	13
Tabel 2.4.1 – Review Rencana Awal RKPD .....	17
Tabel 2.4.2 – Rancangan Awal Renja SKPD 2022 .....	20
Tabel 3.2.1 – Visi, Misi, Tujuan, Sasaran .....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja SKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2021 menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022.

RENJA SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut,

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2).

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Dalam rangka membantu mensukseskan kebijakan dan rencana kerja pimpinan, kami menganggap perlu menyusun suatu rencana kerja yang menggunakan konsep dengan didasari pemikiran analisis manajemen dengan harapan bahwa dengan mengetahui informasi peta kekuatan dan keadaan lingkungan sebagai konsumen yang harus mendapat perhatian serta sumber penyedia kebutuhan organisasi melalui suatu proses analisis sederhana, yang akan mempermudah bagi pelaksana dalam menjabarkannya dan menciptakan kegiatan yang strategis dengan sumber daya yang ada menjadi sumber daya unggulan dan mempunyai kemampuan serta cara atau metode proses penyelesaian dengan cara benar, dan sesuai dengan prosedur.

Sebagai langkah awal adalah kami berusaha mendalami apa yang menjadi visi, misi, kebijakan dan tujuan dan rencana kerja jangka menengah yang ada di Lingkup Kecamatan Rasau Jaya yang termuat dalam rencana strategis Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Kemudian kami sandingkan dengan Tugas pokok dan Fungsi yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi sehingga kami mendapat kesimpulan sederhana bahwa pada dasarnya tiap Sub Bagian dan tiap seksi adalah membantu pimpinan dalam cara mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Rasau Jaya yang merupakan tanggungjawab dan amanat dari penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kubu Raya.

Langkah selanjutnya kami melakukan analisis sederhana dengan menggunakan analisis SWOT, adalah salah satu analisis manajemen yang merupakan suatu kegiatan penelusuran keadaan dan kemampuan

yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi dan Sumber daya yang ada, yang kemudian kami pilah kedalam beberapa factor dan kami beri nilai sendiri untuk dapat menentukan factor kunci sukses dan langkah – langkah strategi dalam rangka melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan atau meraih peluang yang didapat sehingga dapat melaksanakan, guna memberikan manfaat yang lebih besar. Sebagai bahan kajian lebih lanjut hasil analisis diatas, disusun sampai dengan menghasilkan formulasi strategi dan rencana usulan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh personal yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi, sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan kami membangun suatu tim dengan kata kunci kebersamaan, sehingga masing-masing anggota melengkapi dan menutupi kekurangan sempurnaan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam proses pencapaian kegiatan maupun cara pelaksanaannya sehingga kegiatan selesai tepat waktu dan tepat sasaran, semangat membangun dan mempertahankan komitmen bersama untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam mengimplemantasikan visi, misi dan menjalankan tupoksi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja Rasau Jaya Tahun 2022 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751);

5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atass Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

15. Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ( Berita Negara Tahun 2021 Nomor 496)
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2036;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65.A);
25. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Kecamatan Rasau Jaya disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Kecamatan Rasau Jaya untuk jangka waktu satu tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Rasau Jaya adalah :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
- b. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2022 yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya;
- c. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2022 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah;

- d. Memudahkan seluruh jajaran aparaturnya Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022 yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya dan Pemerintah Desa se Kecamatan Rasau Jaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan ini terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAHTAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kinerja Tahun 2022
- 3.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2022

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Rasau Jaya**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Perubahan SKPD sampai dengan Tahun 2020. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya telah dialokasikan anggaran meliputi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai non gaji dan tunjangan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 608.730.550,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.604.784.350,00 atau 99,35%. (per 31 Desember 2020 )

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan**  
**Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kubu Raya**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
<b>PERMENDAGRI NO 13</b>														
4	01	11	01		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>								
4	01	11	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik Kantor	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		24 Bulan	100%
4	01	11	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas Operasional yang patuh pembayaran pajak	18 Kendaraan roda 2	-	9 Kendaraan roda 2	9 Kendaraan roda 2	100%		9 Kendaraan	50%
4	01	11	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Materai	1860 Lembar	930 Lembar	930 Lembar	930 Lembar	100%		1860 lembar	100%

4	01	11	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan yang terpenuhi	6 Orang & 24 bulan	3 Orang & 12 bulan	3 Orang & 12 bulan	3 Orang & 12 bulan	100%		6 Orang & 24 Bulan	100%
4	01	11	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kantor	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24 Bulan	100%
4	01	11	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24 Bulan	100%
4	01	11	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Kelistrikan dan Penerangan Kantor	24 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24 Bulan	100%
4	01	11	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lancarnya Arus Informasi	1440 Exp	720 exp	720 exp	720 exp	100%		1440 Exp	100%
4	01	11	01	017	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah Rapat yang terpenuhi kebutuhan makanan dan minumannya	24 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%		24 Kali	100%
4	01	11	01	018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Keluar daerah	4 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%		4 Kali	100%
4	01	11	01	019	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kedalam daerah	312 Kali	156 Kali	156 Kali	156 Kali	100%		312 Kali	100%
					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>									

					Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang terpenuhi	10 unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%		10 Unit	100%
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	2 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		2 Unit	100%
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%		6 Jenis	100%
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	4 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	0%		4 Jenis	100%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Menambah Umur Ekonomis Gedung Kantor	1 Gedung						-	0%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Menambah Umur Ekonomis Kendaraan Dinas	-	-	-	-	0%		-	0%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Menambah Umur Ekonomis Komputer	16 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%		16 Unit	100%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Menambah Umur Ekonomis Peralatan Kantor	20 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%		20 Unit	100%
					Pengelolaan Website	Meningkatkan daya akses informasi	1 Website				0%		1 Website	100%
					<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>									
					Peringatan hari besar nasional	Terlaksananya hari besar nasional	1 Kegiatan				0%		-	0%

				Penyediaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga yang terpenuhi	40 Stel	20 Stel	20 Stel	20 Stel	100%		40 Stel	100%
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>									
				Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur	12 Orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%		12 Orang	100%
				Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	-				0%		-	0%
				Penyusunan Evaluasi jabatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	-				0%		-	0%
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>									
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		2 Dokumen	100%
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		2 Dokumen	100%
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		2 Dokumen	100%
				Penyusunan Renja, Rka, DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen yang tersusun	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		8 Dokumen	100%
				penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan LKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		4 Dokumen	100%



				Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 dokumen				0%		-	0%
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN</b>									
				Penataan Kearsipan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	0%		1 Kegiatan	100%
				Penyusunan Profil Kecamatan	jumlah dokumen yang tersusun	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		2 Dokumen	100%
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>									
				Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan Yang terlaksana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	0%		1 Kegiatan	50%
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>									
				Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	0	0	0	0%		-	0%
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>									
				Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		2 Kegiatan	100%
				<b>Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga</b>									
				Penyelenggaraan open turnamen bupati cup	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	-				0%		-	0%
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN</b>									

					Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah Desa yang terbina	12 Desa	6 desa	6 desa	6 desa	100%		12 Desa	100%
					<b>PROGRAM PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL UMAT BERAGAMA</b>									
					Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan	1 kegiatan	-	-	0%		1 kegiatan	100%
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN</b>									
					Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terbina	12 Desa	6 desa	6 desa	6 desa	100%		12 Desa	100%
					Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang terbina	12 Desa	6 desa	6 desa	6 desa	100%		12 Desa	100%
					Koordinasi Pelaksanaan pembangunan	Jumlah Desa yang terbina	12 Desa	6 desa	6 desa	6 desa	100%		12 Desa	100%
					Pembinaan Ketertarikan Ketertiban	Jumlah Desa yang terbina	12 Desa	6 desa	6 desa	6 desa	100%		12 Desa	100%
					Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Jenis dokumen Pelayanan yang tersedia	6 Jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%		6 Jenis	100%
					Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		2 Kegiatan	100%
					Fasilitasi dan Pembinaan ADD	Jumlah Desa yang terbina	12 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	100%		12 Desa	100%
					Fasilitasi peningkatan pelayanan Perizinan	Jenis dokumen Pelayanan yang tersedia	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%		6 Jenis	100%
					Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	jumlah kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		2 Kegiatan	100%
					Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		2 Kegiatan	100%
					Fasilitasi penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan	Jumlah Desa yang terbina	12 Desa				0%		6 desa	50%

					Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	jumlah kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	0%		1 Kegiatan	50%
<b>PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019</b>														
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48 Bulan</b>	-	-	-	-	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>25%</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>48 Bulan</b>	-	-	-	-	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>25%</b>
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun (Renja, RKA, DPA, dan DPPA)	16 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	25%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (LKjIP)	624 Kali	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun (LPPD)	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>48 Bulan</b>	-	-	-	-	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>25%</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji	52 Pegawai	-	-	-	-	13 Pegawai	13 Pegawai	25%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (LKPD)	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%

7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (LRA)	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>48 Bulan</b>	-	-	-	-	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>25%</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik kantor	48 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	25%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	48 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	25%
7	01	01	2.06	05	penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan	48 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	25%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratauran Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	25%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	480 Kali	-	-	-	-	120 Kali	120 Kali	25%
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>28 Unit</b>	-	-	-	-	<b>7 Unit</b>	<b>7 Unit</b>	<b>25%</b>
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit yang terpenuhi	4 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	25%
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit yang terpenuhi	8 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	25%

7	01	01	2.07	12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit yang terpenuhi	8 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	25%
7	01	01	2.07	15	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit yang terpenuhi	8 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	25%
7	01	01	2.08		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>64 Stel</b>	-	-	-	-	<b>16 Stel</b>	<b>16 Stel</b>	<b>25%</b>
7	01	01	2.08	18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	64 Stel	-	-	-	-	16 Stel	16 Stel	25%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48 Bulan</b>	-	-	-	-	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>25%</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	48 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	25%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	25%
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>84 Unit</b>	-	-	-	-	<b>21 Unit</b>	<b>21 Unit</b>	<b>25%</b>
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajaka dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	36 Unit	-	-	-	-	9 Unit	9 Unit	25%

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	48 Unit	-	-	-	-	12 Unit	12 Unit	25%
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>4 Dokumen</b>	-	-	-	-	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>25%</b>
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>4 Dokumen</b>	-	-	-	-	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>25%</b>
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>48 Bulan</b>	-	-	-	-	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>25%</b>
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Pelayanan perizinan di kantor	48 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	25%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Pelayanan nonperizinan di kantor	48 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	25%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	8 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	25%

7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	8 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	25%
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	8 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	25%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	4 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	4 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25%
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Desa yang dibina	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%

7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	4 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25%
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	4 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	4 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25%
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dibina	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang dibina	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang dibina	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	24 Desa	-	-	-	-	6 Desa	6 Desa	25%

Berdasarkan tabel yang telah disajikan dapat dijabarkan bahwa pada kolom 11 Tidak semua tingkat capaian target Renstra bisa dipersentasekan karena tidak konsistennya kegiatan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai 2021.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2019 – 2024, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kedudukan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah di bidang Pemerintahan Daerah telah di atur di dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 dan Renstra Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rasau Jaya**  
**Kabupaten Kubu Raya**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80,5/A	82/A	83/A	84/A	80,5/A	-	-	-	
2	Nilai SAKIP			70	75	77	78	72,10	-	80,5 / A	81 / A	
3	Jumlah Desa Mandiri			2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	1 Desa	1 Desa	4 Desa	4 Desa	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Faktor- Faktor yang mempengaruhi, Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Rasau Jaya adalah sebagai berikut :

1 Kualitas sumber daya aparatur yang kurang memadai

Bila dilihat dari rasio tingkat pendidikan, Kantor Camat Rasau Jaya tergolong SKPD yang lemah, hal ini dapat dilihat dari 60% PNS yang ada ditempati oleh lulusan SMA/Sederajat. Demikian pula dengan PNS yang menempati jabatan, dari 8 Jabatan Eselon yang ada, 3 diantaranya ditempati oleh PNS lulusan SMA/Sederajat.

Rendahnya sumberdaya aparatur yang dimiliki jelas menimbulkan permasalahan dalam pelayanan diantaranya:

- Kurangnya pemahaman tentang tupoksi masing-masing.
- Rendahnya pemahaman tentang peraturan perundangan.
- Ketidakpahaman penggunaan IT.

2 Rendahnya Loyalitas

Rendahnya loyalitas sebagian PNS Kantor Camat Rasau Jaya dapat dilihat dari:

- Jam kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan
- Pelimpahan volume kerja sehingga menyebabkan terjadinya overlapping pekerjaan dan penumpukan volume kerja di sebagian PNS lain.

3 Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Dalam menjalankan tugas sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kinerja aparatur, karena kedua hal tersebut adalah faktor yang wajib dan sangat dibutuhkan oleh aparatur dalam menjalankan tugas. Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat berakibat kepada menurunnya kualitas kinerja aparatur itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, telah dilakukan upaya – upaya penanganan antara lain:

- 1 Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan-kegiatan pendidikan serta bimbingan teknis adalah salah satu cara yang diupayakan sehingga kemampuan skill dari aparatur dapat dicapai.

- 2 Selain itu diberikan pengarahan oleh top manajemen mengenai loyalitas kerja yang diamanatkan oleh undang-undang dan diberlakukan reward dan punishment bagi setiap aparatur tanpa terkecuali.
- 3 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana juga menjadi salah satu cara yang dilaksanakan agar dapat menunjang kinerja SKPD. Keberadaan sarana dan prasarana yang baik menjadi salah satu faktor penunjang terciptanya pola kerja yang baik.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Kubu Raya**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,397,382,200</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,852,306,736</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>44,500,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>40,714,112</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA)	4 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	14,881,110

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen yang disusun (LKjIP)	1 Dokumen	4,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	9,626,222
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen yang disusun (LPPD, ANJAB, EVAJAB, SOP)	4 Dokumen	20,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	16,206,780
<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,607,000,000</b>	<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,477,087,751</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Bulan Pegawai yang Menerima Gaji	13 Pegawai	1,800,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,472,539,362
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen yang disusun (LKPD)	1 Dokumen	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3,251,222

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran /SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen yang disusun (LRA)	1 Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran /SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Dokumen	1,297,167
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah</b>	-	-	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>7,799,611</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,297,167
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Kegiatan	3,251,222
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Kegiatan	3,251,222
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	-

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Pakaian Yang Dibuat	16 Stel	15,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 Stel	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rasau Jaya	jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	-	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>274,545,200</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>153,559,636</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 Bulan	8,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	2,548,436
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	45,779,514
penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Penggandaan	12 Bulan	26,000,000	penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	10,580,686
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	2,545,200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Bulan	1,460,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	12 Bulan	188,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kali	93,191,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>7 Unit</b>	<b>125,337,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6 Unit</b>	<b>46,000,000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Unit yang terpenuhi	1 Unit	40,337,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	
Pengadaan Mebel	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Unit yang terpenuhi	2 Unit	20,000,000	Pengadaan Mebel	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Unit yang terpenuhi	2 Unit	35,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	32,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Unit yang terpenuhi	2 Unit	30,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>105,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>107,127,168</b>

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, Listrik	12 Bulan	15,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	19,200,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	90,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	87,927,168
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>21 Unit dan 1 Bangunan</b>	<b>23,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>21 Unit dan 1 Bangunan</b>	<b>20,018,458</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	9 Unit	3,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	1,306,458
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Unit yang dipelihara	12 Unit	20,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8,712,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Bangunan	10,000,000

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>98,000,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>11,499,552</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>2,296,222</b>
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	5,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	2,296,222
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>93,000,000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>9,203,330</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	12 Bulan	5,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Kali	1,700,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	12 Bulan	8,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1,488,300

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	80,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Kegiatan	6,015,030
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>100%</b>	<b>35,345,137</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>100%</b>	<b>28,040,680</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>35,345,137</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>28,040,680</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	1 Kegiatan	20,345,137	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	16,580,304
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	1 Kegiatan	15,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	11,460,376
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>60,000,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>41,700,994</b>

<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Jumlah Desa yang Dibina</b>	<b>6 Desa</b>	<b>60,000,000</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>6 Desa</b>	<b>41,700,994</b>
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	6 Desa	60,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	96 kali	41,700,994
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>45,000,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>14,892,078</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>45,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>14,892,078</b>

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	45,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	14,892,078
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>204,000,000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>158,008,656</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Jumlah Desa yang Dibina</b>	<b>6 Desa</b>	<b>204,000,000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>	<b>6 Desa</b>	<b>158,008,656</b>

							<b>Desa</b>		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Fasilitasi Yang Dilaksanakan	6 Desa	80,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	96 Kali	74,517,156
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Fasilitasi Yang Dilaksanakan	6 Desa	8,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Kali	2,100,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Fasilitasi Yang Dilaksanakan	6 Desa	55,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	96 Kali	40,170,750
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Fasilitasi Yang Dilaksanakan	6 Desa	6,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan	3 Kali	1,050,000

							Penegasan Batas Desa		
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	6 Desa	55,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	96 Kali	40,170,750
				<b>2,839,727,337.00</b>					<b>2,106,448,696</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dilakukan sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya dimulai dengan membuat Rancangan awal RKPD. Pelaksanaan selanjutnya dilakukan dengan melakukan musrenbang desa guna menampung aspirasi langsung dari masyarakat. Hasil dari musrenbang tingkat desa ini nantinya akan dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kecamatan untuk dilakukan perangkaan berdasarkan usulan prioritas. Tahapan ini dimaksudkan guna mengkoordinasikan penyusunan rancangan SKPD, Renja SKPD dan usulan dari masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan musrenbang penyusunan RKPD. Hasil ini nantinya akan dijadikan sebagai Rancangan akhir RKP. Kecamatan Rasau Jaya melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung yang ditransformasikan menjadi program dan kegiatan yang ada di SKPD. Usulan program dan kegiatan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten Kubu Raya**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Pelaksana)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	RT 16 ,RT 29, RT 34, RT 43 /RW 07 DUSUN BANJAR TENGAH DESA RASAU JAYA DUA, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	2 KILO METER	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	RT 40 RW 08 Dusun Banjar Tengah- RT 42 RW 11 Tanjung Wangi, Kab. Kubu Raya,	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	6 KILO METER	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

		Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua			Permukiman
3	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	RT 33 RW 06 DUSUN BANJAR REJO, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	RT 30 RW 12 Dusun Tanjung Wangi, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	RT 32 RW 14 DUSUN BANJAR SARI, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	2 KILO METER	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	RT 22 RW 09 Dusun Banjar Laut, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	1,3 KILO METER	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia	RT 33 RW 06 Dusun Banjar Rejo, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua	Jumlah Bangunan	1 UNIT	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Keterbatasan populasi hewan ternak sapi, kambing, ayam dan lainnya	RT 33 RW 06 DUSUN BANJAR REJO, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua	Jumlah Hewan Ternak	200 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
9	Bangunan gedung tempat pendidikan kabupaten yang rusak/belum tersedia	RT 03 RW 06 DUSUN BANJAR REJO, Kab. Kubu Raya,	Jumlah Bangunan	6 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

		Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia	RT 033 RW 06 DUSUN BANJAR REJO, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Dua	Jumlah Bangunan	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Desa Rasau Jaya Tiga Dusun I Sangkar Mas Jalan Rajawali TR 04, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Tiga	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	Pj : 900 m x Lbr : 3 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Desa Rasau Jaya Tiga Dusun II Sumber Makmur, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Tiga	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	Pj : 500 m x Lbr : 3 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Dusun III Manunggal Karso RT 003 RW 005 Rasau Jaya Tiga, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Tiga	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	Pj : 500 m x Lbr : 3 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Dusun V Margo Sari Rasau Jaya Tiga, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Tiga	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	Pj : 750 m x Lbr : 3 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	TR 07 Sekunder A Dusun I Rasau Jaya Tiga, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Tiga	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	Pj : 25 m x Lbr : 3 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

16	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Sekunder B TR 3 4 5 6 Dusun II Rasau Jaya Tiga, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Tiga	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	Pj : 1000 m x Lbr : 3 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17	Terbatasnya kebutuhan alat dan mesin pertanian di 9 kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya	Desa Rasau Jaya Tiga, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Tiga	Jumlah alat dan mesin yg dibutuhkan	10 Paket	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
18	Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia	Desa Rasau Jaya Tiga Jalan Bhakti RT 001 RW 005, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Tiga	Jumlah Bangunan	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Jalan Raya Bintang Mas Rt 011/Rw 04 s.d Rt 001/Rw 01 Dusun Rasau Kapas Desa Rasau Jaya Umum, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	panjang:3.000 m lebar: 4 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	Bangunan perkuatan tebing yang rusak/belum tersedia	Rt 014/Rw 05 s.d Rt 033/Rw 05 Dusun Rasau Tanjung Desa Rasau Jaya Umum, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum	Jumlah Bangunan	panjang: 3.500 m lebar: 3 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Rt 024/ Rw 08, Rt 025/ Rw 08 Dusun Rasau Karya Desa Rasau Jaya Umum, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum	Jumlah Luas yang dibangun	panjang : 500 m lebar: 2 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
22	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Rt 028/Rw 09 Dusun Rasau Karya Desa Rasau Jaya Umum, Kab. Kubu	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	panjang : 500 m lebar: 2 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan

		Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum			Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Rt 032/Rw 02 s.d Rt 010/Rw 03 Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	panjang : 2.500 m lebar: 3 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
24	Bangunan gedung kesehatan kabupaten yang rusak/belum tersedia	Rt 028/Rw 09 Dusun Rasau Karya Desa Rasau Jaya Umum, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum	Jumlah Bangunan	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25	Minimnya sarana dan prasarana penangkapan bagi nelayan kecil	Desa Rasau Jaya Umum, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum	Jumlah Nelayan	500 orang	Dinas Perikanan
26	Terbatasnya kebutuhan alat dan mesin pertanian di 9 kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya	Desa Rasau Jaya Umum, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum	Jumlah Kelompok tani	23 Gapoktan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
27	Terbatasnya pemenuhan kebutuhan pengendalian hama dan penyakit tanaman	Desa Rasau Jaya Umum, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Umum	Jumlah Kelompok tani	23 Gapoktan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
28	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Jalan Bintang Mas III Dusun Sepakat Maju RT 002 RW 002, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Pematang Tujuh	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	900 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
29	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Jalan Bintang Mas IV Dusun Sepakat Maju RT 002 RW 005, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Pematang Tujuh	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	900 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

30	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Jalan Bintang Mas IV Dusun Suka Damai RT 002 RW 004, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Pematang Tujuh	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	1500 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
31	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Bintang Mas IV Dusun Suka Damai TR 2 RT 001 RW 004, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Pematang Tujuh	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	500 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
32	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Bintang Mas IV Dusun Suka Damai TR 3 RT 001 RW 004, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Pematang Tujuh	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	300 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
33	Pemenuhan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bintang Mas IV Dusun Suka Damai RT 001 RW 004, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Pematang Tujuh	Jumlah Bangunan	1 Unit	Dinas Perhubungan
34	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Bintang Mas IV Dusun Suka Damai TR 1 s/d TR 8 RW 04, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Pematang Tujuh	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	8 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
35	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Bintang Mas V Dusun Suka Damai TR 4,6,7,10 dan 11 RW 01 dan RW 03, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Pematang Tujuh	Jumlah Luas yang dibangun	5 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
36	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Bintang mas IV Dusun Sepakat Maju RW 05, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya,	Jumlah Luas yang dibangun	9 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan

		Pematang Tujuh			Rakyat dan Kawasan Permukiman
37	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	TR.11 RT.006 Rw.004 Dusun Mulyo Rejo - TR.12 Rt.008 Rw.002 Dusun Sido Mulyo Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	P : 28m x L : 2 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
38	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Jalan Bintang Mas 1 Dusun Sido Mulyo Rt. 009 Rw. 002, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	P : 2800 m x L : 3 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
39	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Dusun Mekar Jaya Rt.002 Rw.005, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	P : 28 m x L : 2 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Poros 3 Dusun Mekar Jaya Rt.004 Rw.006, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	P : 200 m x L : 2 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
41	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Jalan Lingkungan Bintang Mas 1 Dusun Sido Mulyo Rt.009 Rw.002, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	P : 1500 m x L : 3 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
42	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Jalan Pendidikan 1 Dusun Sido Mulyo Rt.001 Rw.001, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	P : 250m x L : 3 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

					Permukiman
43	Bangunan gedung tempat pendidikan kabupaten yang rusak/belum tersedia	Jalan Pendidikan 1 Dusun Sido Mulyo Rt.001 Rw.001, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah Bangunan	2 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
44	Bangunan gedung kesehatan kabupaten yang rusak/belum tersedia	Jalan Pendidikan II Dusun Mulyo Rejo Rt.004 Rw.003, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah Bangunan	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
45	Masih Kurangnya dukungan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan Hortikultura	Jalan Pendidikan II No 1 Balai Desa Bintang Mas Dusun Mulyo Rejo Rt.004 Rw.003, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah sarana dan Prasarana yang dipenuhi	2 Unit	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
46	Minimnya sarana dan prasarana penangkapan bagi nelayan kecil	Desa Bintang Mas, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah sarana dan Prasarana yang dipenuhi	8 Buah	Dinas Perikanan
47	Keterbatasan populasi hewan ternak sapi, kambing, ayam dan lainnya	Desa Bintang Mas, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Bintang Mas	Jumlah Hewan ternak	1000 Ekor	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
48	Saluran drainase yang rusak/belum tersedia	Depan Kantor Desa Rasau Jaya Satu Jl. Jenderal Sudirman, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Luas saluran Drainase yang diperbaiki	P. 50 m x L 0,40 m x T. 0,70 m (2 sisi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
49	Saluran drainase yang rusak/belum tersedia	Jl. Sunan Bonang Patok 5 RT.004 RW.002 Dusun Rejo Agung, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Luas saluran Drainase yang diperbaiki	P. 100 m x L. 0,40 m x T. 4 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

50	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Jl. Dr. Sutomo Ke arah Desa Rasau Jaya Dua, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	P. 300 m x L. 2 m x T. 0,15 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
51	Jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Patok 3 Dusun Bina Karya Kearah Sekunder C, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	P. 150 m x L. 2,5 m x T. 0,15 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
52	Masih Kurangnya dukungan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan Hortikultura	Tanah Aset Desa Rasau Jaya Satu, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Jumlah sarana dan Prasarana yang dipenuhi	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
53	Pagar bangunan yang rusak/belum tersedia	Jl. Pahlawan patok 18 Dusun Suka Bakti, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Jumlah Bangunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
54	Pagar bangunan yang rusak/belum tersedia	Patok 17 Sekunder B Kiri Dusun kebun Jeruk, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Jumlah Bangunan	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
55	Bangunan gedung kesehatan kabupaten yang rusak/belum tersedia	Jl. Sultan Agung Dusun Bina Karya, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Jumlah Bangunan	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
56	Saluran darinase yang rusak/belum tersedia	Jl. Jenderal Sudirman (depan puskesmas) Dusun Suka Bakti, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Luas saluran Drainase yang diperbaiki	P. 50 m x L 0,40 m x T. 0,70 m (2 sisi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

57	Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia	Dusun Kebun Jeruk, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Jumlah Bangunan	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
58	Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia	Lapangan Patok 5 Dusun Bina Karya, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Jumlah Bangunan	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
59	Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia	Tanah Aset Desa Rasau Jaya Satu, Kab. Kubu Raya, Rasau Jaya, Rasau Jaya Satu	Jumlah Bangunan	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### BAB III

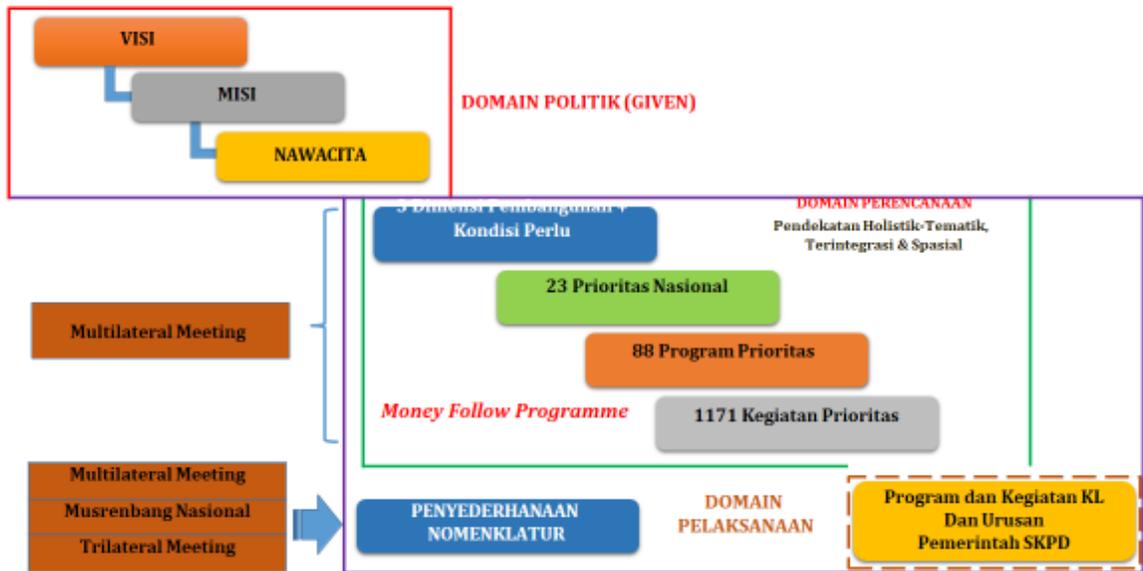
## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

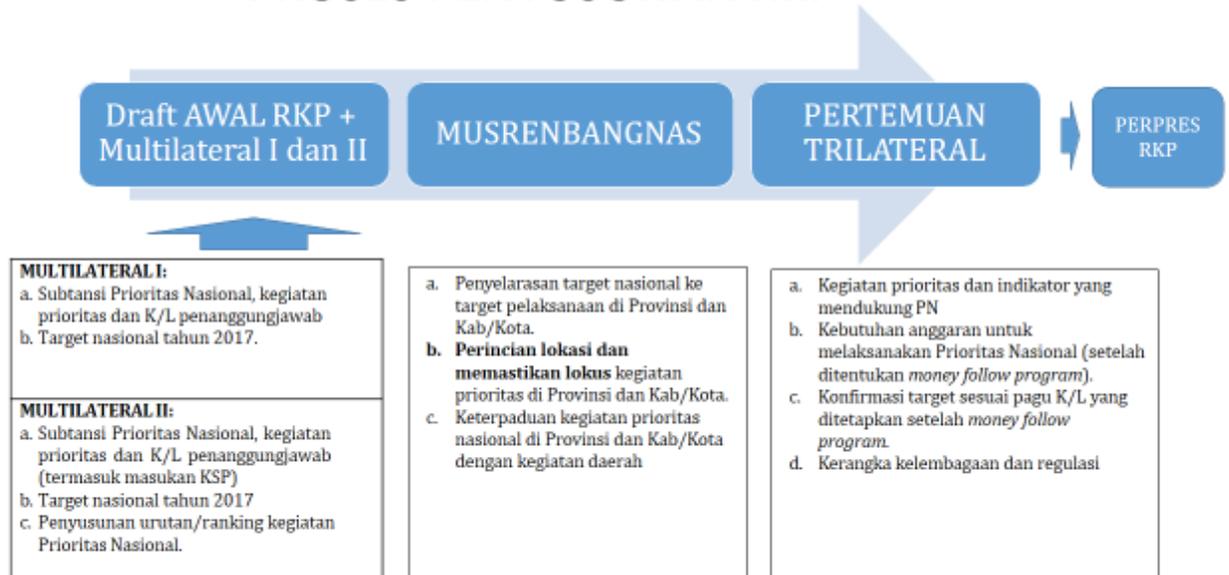
#### 3.1.1. Telaahan Kebijakan Nasional

### PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP

Pendekatan *Money Follow "Program Prioritas"* → Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial



### PROSES PENYUSUNAN RKP



6

## STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN TEMA RKP



## PRIORITAS NASIONAL RKP 2017

Prioritas Nasional
1. Revolusi Mental
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Perumahan dan Permukiman
5. Kedaulatan Pangan
6. Maritim dan Kelautan
7. Kedaulatan Energi
8. Pembangunan Pariwisata
9. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
10. Antar Kelompok Pendapatan
11. Reformasi Agraria
12. Daerah Perbatasan
13. Daerah Tertinggal
14. Desa dan Kawasan Pedesaan
15. Perkotaan
16. Konektivitas
17. Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum
18. Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban
19. Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi
20. Reformasi Birokrasi
21. Perbaikan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha
22. Peningkatan Ekspor Nonmigas
23. Reformasi Fiskal

Untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu;

- Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segena bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan:
  - Membangun untuk manusia dan masyarakat;

- Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktifitas, tidak menciptakan ketimpangan yang makin melebar perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktifitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
  - Aktifitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem 3 DIMENSI PEMBANGUNAN kemaritiman dan kelautan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
  6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
  9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

### **3.1.2. Telaahan Kebijakan Provinsi**

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 2013 - 2018, dianggap perlu menguraikan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan. Kebijakan umum dimaksud merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Sedangkan program pembangunan, lebih diarahkan pada perumusan prioritas pembangunan sebagai operasionalisasi visi dan misi pembangunan daerah.

### **Kebijakan Umum**

Kebijakan umum pembangunan daerah Kalimantan Barat dalam lima tahun mendatang secara umum diarahkan pada melanjutkan program pembangunan lima tahun sebelumnya, khususnya pada capaian sasaran pembangunan yang belum tercapai serta perlu

mendapat perhatian lebih. Dan, sasaran yang telah tercapai senantiasa akan ditingkatkan dan dilanjutkan dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, agar adanya arah maupun pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan rumusan terhadap kebijakan pembangunan yang secara umum memberikan penjelasan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilakukan. Terdapat 3 (tiga) kebijakan umum yang akan ditempuh selama lima tahun ke depan dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah, yaitu :

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan lima tahun mendatang guna mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera dalam bentuk percepatan pembangunan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, yang diwujudkan dengan bertumpu pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Melaksanakan kebijakan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) terkait komoditas unggulan Kalimantan Barat yaitu pengolahan produk yang berbasis kelapa sawit dan Bauksit. Di sisi lain juga melaksanakan kebijakan sebagaimana yang digariskan dalam Masterplan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang disebutkan pada butir di atas, diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sistem hukum yang berfungsi secara kredibel, bersih, adil serta pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten.

### **Prioritas Pembangunan**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, agenda prioritas yang akan dilaksanakan, untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan pada lima tahun ke depan, terdapat 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu : meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat; meningkatnya kecerdasan sumber daya manusia; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publik; meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar; peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; dan meningkatnya

pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan budaya.

### **Prioritas 1 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong peningkatan produktivitas secara lebih efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 10 (sepuluh) fokus prioritas yaitu: revitalisasi pertanian, revitalisasi perkebunan, revitalisasi bidang perikanan dan kelautan, revitalisasi peternakan, revitalisasi kehutanan, revitalisasi industri, penguatan perdagangan, pembangunan kepariwisataan, pengembangan koperasi dan UMKM, serta pembangunan energi dan sumber daya mineral.

**Fokus Prioritas Revitalisasi Pertanian**, bertujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, kemandirian dan akses masyarakat, khususnya petani melalui kegiatan antara lain sebagai berikut : peningkatan ketahanan pangan pokok; peningkatan produksi tanaman pangan dengan peningkatan produktivitas dan pemanfaatan kapasitas dan potensi lahan; pengembangan komoditi hortikultura dan penganekaragaman hasil produksi; peningkatan kualitas produksi, distribusi, pasar dan penanganan pasca panen yang berorientasi agribisnis; peningkatan sistem jaringan pengairan dan sarana transportasi; dan pengembangan sistem penyuluhan pertanian terpadu dengan melibatkan tenaga penyuluh yang berkualitas dengan jumlah yang cukup dan fasilitas yang memadai.

**Fokus Prioritas Revitalisasi Perkebunan** ini bertujuan meningkatkan sumber daya perkebunan dengan kegiatan antara lain : peremajaan kebun karet rakyat; pengembangan komoditas karet, kakao, lada, kelapa sawit dan kelapa dalam; pengadaan bibit yang berkualitas; pengembangan sumber daya petani (masyarakat); perlindungan dan pengembangan perkebunan skala kecil dan menengah; pengembangan agroindustri dan agribisnis; dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

**Fokus Prioritas Revitalisasi Bidang Perikanan dan Kelautan**, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kemampuan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan serta pemasar hasil perikanan guna meningkatkan nilai ekspor dan pendapatan daerah, dengan kegiatan antara lain : pengembangan

sarana dan prasarana penunjang; peningkatan kualitas dan kuantitas keanekaragaman produksi; pengembangan teknologi penangkapan ikan; pengembangan budi daya perikanan air tawar, air payau dan air laut; pembinaan keterampilan kepada para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan (khususnya skala usaha perikanan kecil); dan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penangkapan, budi daya, pengolahan, pemasaran dan manajerial usaha di bidang perikanan.

**Fokus Prioritas Revitalisasi Peternakan**, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan dan kapasitas kemandirian petani ternak serta menunjang produksi pangan daerah melalui kegiatan antara lain : peningkatan intensifikasi yang ditujukan terutama pada peningkatan kualitas bibit dan pemeliharaan kesehatan ternak serta pemasaran; peningkatan ekstensifikasi dalam rangka mengembangkan pusat-pusat peternakan baru yang disesuaikan dengan potensi lahan yang dimiliki; dan peningkatan dan pemerataan pendistribusian bibit ternak kepada peternak.

**Fokus Prioritas Revitalisasi Kehutanan**, bertujuan untuk memantapkan keberadaan kawasan hutan, menjaga dan melestarikan sumber daya hutan, meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan hutan, mengoptimalkan produksi hasil hutan kayu dan non kayu, menjaga dan mempertahankan hak-hak negara atas

hutan dan hasil hutan, serta memberikan akses lapangan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan antara lain : pemantapan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan; pembangunan unit manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan; Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; pembangunan hutan tanaman, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan taman hutan raya; pengembangan usaha masyarakat desa hutan; pemanfaatan usaha jasa lingkungan dan wisata alam; konservasi keanekaragaman hayati bernilai tinggi; pembinaan dan pengendalian perizinan usaha di bidang kehutanan; pengembangan industri pengolahan hasil hutan, penegakan hukum di bidang kehutanan; peningkatan perlindungan hutan dan pencegahan kerusakan hutan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, peningkatan sinergisitas perencanaan dan informasi pembangunan kehutanan.

**Fokus Prioritas Revitalisasi Industri**, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui kegiatan antara lain: pengembangan industri pengolahan hasil dan pendukung produksi sektor primer dalam upaya pembangunan industri hilir yang mengolah komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Barat; peningkatan dan pengembangan industri kecil dan industri menengah termasuk industri kerajinan dan rumah tangga serta industri kreatif; peningkatan akses permodalan bagi pengrajin industri kecil, menengah serta pengembangan akses pasar untuk produk-produk unggulan.

**Fokus Prioritas Penguatan Perdagangan**, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri melalui kegiatan yang mendorong : diversifikasi komoditas dan tujuan pasar ekspor; penggunaan produk dalam negeri dan perlindungan konsumen; peningkatan pelayanan kemetretrologian legal; peningkatan daya saing produk ekspor daerah; serta peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar tradisional, resi gudang dan pasar lelang.

**Fokus Prioritas Pembangunan Kepariwisata**, bertujuan untuk mengembangkan potensi kepariwisataan daerah agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan pelestarian budaya melalui kegiatan : pengembangan obyek wisata potensial (wisata budaya dan sejarah, wisata alam, dan wisata bahari) di daerah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan; mengupayakan pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang potensi-potensi wisata yang ada; peningkatan pemasaran dan promosi; dan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya pariwisata.

**Fokus Prioritas Pengembangan Koperasi dan UMKM**, tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah terbentuknya koperasi dan UMKM yang handal dan memiliki daya saing produk melalui kegiatan antara lain: pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan, manajemen koperasi dan UMKM; peningkatan akses permodalan yang mendukung koperasi dan UMKM; peningkatan fasilitasi promosi produk koperasi dan UMKM melalui pameran dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional; peningkatan peran serta dan kemampuan

para pengusaha; pengembangan perdagangan internasional dalam rangka peningkatan ekspor dan pengendalian impor; serta pengembangan Sistem Informasi Usaha.

**Fokus Prioritas Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral**, diarahkan pada pengembangan energi baru dan terbarukan dengan kegiatan antara lain : pengembangan energi listrik alternatif melalui pembangunan PLTU dan PLTA; pemetaan potensi pertambangan yang terukur; pembinaan pertambangan rakyat; dan membangun sistem pengelolaan pertambangan dengan penyertaan saham bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

**Fokus Prioritas Pembangunan Lingkungan Hidup**, tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan lingkungan adalah agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan melalui kegiatan: pengembangan model pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); penertiban kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan pengembangan mata pencaharian alternatif; penanggulangan bencana asap dengan penyuluhan, penegakan hukum, pengembangan teknologi budi daya ramah lingkungan, dan pengembangan mata pencaharian alternative; pengembangan model pengelolaan SDA; pemberian sanksi hukum secara tegas terhadap perusakan lingkungan; dan penghargaan bagi anggota atau kelompok masyarakat yang melestarikan lingkungan hidup.

## **Prioritas 2 : Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia**

Dalam jangka panjang membangun kecerdasan masyarakat secara merata akan menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi pembangunan daerah. Sedangkan jangka pendek dengan meningkatnya kecerdasan sumber daya manusia akan meningkatkan kemampuan produktivitas masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilaksanakan melalui fokus prioritas peningkatan keterampilan masyarakat.

**Fokus Prioritas Peningkatan Keterampilan Masyarakat**, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan bidang usaha yang digeluti sehingga masyarakat menjadi produktif dan memiliki daya saing tinggi baik di pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri, melalui kegiatan sebagai berikut : peningkatan frekuensi kegiatan pelatihan keterampilan; peningkatan frekuensi kegiatan magang bagi

tenaga kerja; peningkatan bimbingan teknis, dan penyuluhan lapangan; peningkatan SDM melalui lembaga formal dan non formal; pengembangan lembaga-lembaga pelatihan kerja; pengembangan paket *kewajiban belajar (kejar)* A dan B; percepatan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun; peningkatan kualitas dan kuantitas guru; pengembangan model pembelajaran yang berorientasi output; peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan; pengembangan lembaga pusat pendidikan kejuruan terpadu setaraf sekolah lanjutan tingkat atas; dan pengembangan pendirian lembaga pendidikan tinggi daerah.

### **Prioritas 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani merupakan modal utama pembangunan. Untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terdapat 2 (dua) fokus prioritas yaitu peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

**Fokus Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan**, bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui kegiatan yang antara lain sebagai berikut : peningkatan pelayanan dan penerapan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin; peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, polindes, dan posyandu; perbaikan gizi masyarakat, khususnya ibu dan anak; peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis; pemberdayaan lembaga-lembaga kesehatan; dan peningkatan penyuluhan kesehatan.

**Fokus Prioritas Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan**, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan melalui kegiatan: pengembangan puskesmas, polindes, dan posyandu di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan; peningkatan jumlah penyebaran tenaga medis dan paramedis di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan; peningkatan subsidi pengadaan obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau; dan peningkatan manajemen kesehatan.

### **Prioritas 4 : Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik.**

Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang handal untuk memberikan kemudahan

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sederhana, maka terdapat 2 (dua) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu : peningkatan sumber daya aparatur dan restrukturisasi organisasi dan perangkatnya.

**Fokus Prioritas Peningkatan Sumber Daya Aparatur**, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan profesionalisme aparatur, melalui kegiatan : peningkatan kuantitas aparatur mengikuti pendidikan formal dan non formal; peningkatan kemampuan manajerial dan operasional staf; peningkatan kerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi lokal, regional dan internasional dalam peningkatan sumber daya aparatur; dan peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur.

**Fokus Prioritas Restrukturisasi Organisasi dan Perangkatnya**, bertujuan untuk memudahkan prosedur serta efisiensi jangkauan pelayanan terutama pada level struktur organisasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : pengembangan struktur dan manajemen organisasi pemerintah yang efektif dan efisien; peningkatan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan regulasi; pengembangan mekanisme perencanaan dari bawah ke atas; pengkajian ulang penempatan calon pejabat sesuai dengan jenjang karir kepegawaian, kapasitas dan kapabilitasnya; pengembangan sistem karir kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku; dan penerapan sistem penghargaan (*reward*) kepada pegawai yang berprestasi.

#### **Prioritas 5 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar**

Tersedianya infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan bijaksana guna mencegah gejolak sosial dan kecemburuan sosial. Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar tersebut, maka terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu : peningkatan sarana dan prasarana; pemeliharaan sarana dan prasarana; dan program khusus.

**Fokus Prioritas Peningkatan Sarana dan Prasarana**, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan. Untuk mewujudkan program ini, maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain: percepatan

penyelesaian jalan trans Kalimantan poros selatan; pengembangan akses jalan pada kawasan ekonomi produktif khususnya di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan; pembangunan pelabuhan laut internasional dan peningkatan pelabuhan udara; pengembangan sumber air bersih di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, kepulauan dan perkotaan; pengembangan energi listrik di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, kepulauan dan perkotaan; serta peningkatan sarana dan prasarana; transportasi, komunikasi dan permukiman di daerah terisolir.

**Fokus Prioritas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**, bertujuan untuk memelihara sarana dan prasarana yang sudah ada melalui kegiatan antara lain: peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar; dan pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar.

**Fokus Prioritas Program khusus**, bertujuan untuk membuka daerah- daerah terisolir dan membuka kawasan-kawasan ekonomi baru di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan melalui kegiatan: peningkatan akses infrastruktur jalan di wilayah pedalaman perbatasan, pesisir dan kepulauan; penataan wilayah administrasi dan tapal batas baik di darat maupun di laut; peningkatan kerja sama dengan negara tetangga; pengembangan model pengelolaan wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan; pengembangan model wilayah perbatasan dengan konsep pelabuhan darat di setiap *Border Development Centre* yang pengelolaannya diserahkan pada pemerintah daerah; pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Terpadu; pengelolaan pulau-pulau kecil dengan kegiatan konservasi, pariwisata dan budi daya perikanan; pembangunan BDC di Entikong, Jagoi Babang, Aruk, Badau dan Senaning.

#### **Prioritas 6 : Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan**

Faktor penting sebagai pendorong percepatan pembangunan adalah masuknya arus investasi dan meningkatnya pendapatan asli daerah yang digali dari potensi penerimaan daerah, yang nantinya bermuara pada kemampuan menghimpun sumber dana pembangunan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dilakukan dengan 3 (tiga) fokus prioritas pembangunan yaitu : penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi; peningkatan pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan peningkatan sumber pendanaan dekonsentrasi.

**Fokus Prioritas Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM**, bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga-lembaga pendukung melalui kegiatan antara lain: peningkatan kualitas lembaga Koperasi dan UMKM; peningkatan bimbingan teknis dan informasi pasar bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi; pengembangan Koperasi dan UMKM yang berbasis sumber daya dan komoditas unggulan yang berorientasi ekspor; peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan kelembagaan Koperasi dan UMKM; dan penyederhanaan perizinan dan peraturan dalam mendukung berkembangnya Koperasi dan UMKM; dan pemberdayaan serta perlindungan Koperasi dan UMKM.

**Fokus Prioritas Peningkatan Pengelolaan PAD**, bertujuan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Untuk mendukung program tersebut maka kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : pengembangan Manajemen pengelolaan keuangan daerah; pengembangan model pengelolaan PAD; pengembangan badan usaha milik daerah; dan penggalan sumber-sumber pendapatan yang potensial.

**Fokus Prioritas Peningkatan Sumber Pendanaan Dekonsentrasi**, bertujuan untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun dengan pihak ketiga melalui kegiatan: peningkatan komunikasi dengan Kementerian terkait secara efektif; peningkatan komunikasi dengan Badan Anggaran DPR RI, Anggota DPR RI dan DPD RI asal Kalimantan Barat; dan pengembangan kemitraan dan *networking* dengan pihak ketiga.

### **Prioritas 7 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya.**

Pembangunan yang merata dan adil akan mencegah terjadinya distorsi ekonomi. Disisi lain kondisi yang aman dan damai serta masyarakatnya memiliki ketahanan budaya merupakan faktor penting pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil, aman, damai dan memiliki ketahanan budaya, terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu: peningkatan iklim dan suasana kondusif; peningkatan kerukunan beragama; dan peningkatan ketahanan budaya.

**Fokus Prioritas Peningkatan Iklim dan Suasana Kondusif,** untuk memberikan kenyamanan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat dalam berusaha, melalui kegiatan : penegakan supremasi hukum; pembinaan dan penyuluhan hukum; dan peningkatan kerja sama kemitraan dengan lembaga keamanan dan hukum.

**Fokus Prioritas Peningkatan Kerukunan Beragama;** diarahkan untuk menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing melalui kegiatan antara lain: pengembangan dialog lintas suku bangsa dan agama secara periodik; peningkatan pembinaan dan bantuan natura kepada rumah ibadah; dan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama.

**Fokus Prioritas Peningkatan Ketahanan Budaya;** bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan mempertahankan budaya lokal serta sekaligus membentuk ketahanan budaya masyarakat melalui kegiatan antara lain: peningkatan, penggalian dan pengembangan budaya tradisional; pembinaan dan penyuluhan tradisi budaya lokal; pengembangan kurikulum pendidikan budaya pada sekolah-sekolah; pengembangan model pelestarian budaya lokal; serta revitalisasi adat istiadat, budaya dan hukum adat.

**Tabel 3.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rasau Jaya**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran pada Tahun -					
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Nilai IKM	1	Meningkatnya nilai IKM	1	Nilai IKM	80 / Baik	80.5 / Baik	82 / Baik	-	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	Nilai SAKIP	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	Nilai SAKIP	-	-	75 / BB	80,5 / A	81 / A	82 / A
3	Meningkatnya status desa	3	Jumlah Desa Mandiri Meningkatkan	3	Meningkatnya Status Desa	3	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	3 Desa	4 Desa	4 Desa	6 Desa

### 3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok.

Adapun program dan kegiatan pokok yang telah dan akan dilaksanakan diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan dalam Renja Kantor Camat Rasau Jaya Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang sudah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - B. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD
  - C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
    - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratauran Perundang-undangan
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajaka dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
  - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  - A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - A. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  - A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
    - d. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
    - e. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan

dan sasaran tertentu. Dalam uraian kegiatan tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan dari SKPD yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja kegiatan tersebut harus dapat menggambarkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

- Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi;
- Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- Relevan, yaitu indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan dengan TUPOKSI, tujuan serta manfaat dan dampak;
- Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran dan hasil serta manfaat dan dampak;
- Cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan;
- Efektif, data/informasi yang terkait dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan sumber daya yang tersedia;
- Dievaluasi secara terus menerus setiap tahun untuk dapat memenuhi tuntutan stakeholders dan pencapaian visi dan misi organisasi.

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

**Kabupaten Kubu Raya**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7									
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01								
7	01	01							
7	01	01							
7	01	01	2.0	1					
7	01	01	2.0	1	0				
7	01	01	2.0	1	0				
7	01	01	2.0	1	6				

					Kinerja SKPD								
7	0 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun (LPPD, ANJAB, EVAJAB, SOP)	Kec. Rasau Jaya	4 Dokumen	16,206,780	APBD		4 Dokumen	20,000,000
<b>7</b>	<b>0 1</b>	<b>0 1</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>100%</b>	<b>1,477,087,751</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1,610,400,000</b>
7	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Bulan Pegawai yang Menerima Gaji	Kec. Rasau Jaya	14 Bulan	1,472,539,362	APBD		14 Bulan	1,600,000,000
7	0 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (LKPD)	Kec. Rasau Jaya	1 Dokumen	3,251,222	APBD		1 Dokumen	8,400,000
7	0 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/S KPD	Jumlah Dokumen yang disusun (LRA)	Kec. Rasau Jaya	1 Dokumen	1,297,167	APBD		1 Dokumen	2,000,000
<b>7</b>	<b>0 1</b>	<b>0 1</b>	<b>2.0 3</b>		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>100%</b>	<b>7,799,611</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>
7	0 1	0 1	2.0 3	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Rasau Jaya	1 Dokumen	1,297,167	APBD		1 Dokumen	5,000,000
7	0 1	0 1	2.0 3	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Rasau Jaya	1 Kegiatan	3,251,222	APBD		1 Kegiatan	7,500,000
7	0 1	0 1	2.0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Rasau Jaya	1 Kegiatan	3,251,222	APBD		1 Kegiatan	7,500,000

7	0 1	0 1	2.0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>		<b>100%</b>	-	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>15,000,000</b>
7	0 1	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang Dibuat	Kec. Rasau Jaya		16 Stel	-	APBD		16 Stel	15,000,000
7	0 1	0 1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	Kec. Rasau Jaya		-	-	APBD		-	-
7	0 1	0 1	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>		<b>100%</b>	<b>153,559,636</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>193,016,872</b>
7	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kec. Rasau Jaya		12 Bulan	2,548,436	APBD		12 Bulan	5,096,872
7	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rasau Jaya		12 Bulan	45,779,514	APBD		12 Bulan	50,000,000
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Penggandaan	Kec. Rasau Jaya		12 Bulan	10,580,686	APBD		12 Bulan	15,000,000
7	0 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Rasau Jaya		12 Bulan	1,460,000	APBD		12 Bulan	2,920,000
7	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kec. Rasau Jaya		250 Kali	93,191,000	APBD		250 Kali	120,000,000
7	0 1	0 1	2.0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>		<b>6 Unit</b>	<b>46,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>6 Unit</b>	<b>114,937,000</b>

7	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit yang terpenuhi	Kec. Rasau Jaya	-		APBD		1 Unit	40,337,000
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit yang terpenuhi	Kec. Rasau Jaya	1 Unit	5,000,000	APBD		1 Unit	21,000,000
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	Kec. Rasau Jaya	3 Unit	32,000,000	APBD		3 Unit	33,600,000
7	0	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	Kec. Rasau Jaya	2 Unit	9,000,000	APBD		2 Unit	20,000,000
7	0	0	2.0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>107,127,168</b>	<b>APBD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>116,500,000</b>
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, Listrik	Kec. Rasau Jaya	12 Bulan	19,200,000	APBD		12 Bulan	22,000,000
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rasau Jaya	12 Bulan	87,927,168	APBD		12 Bulan	94,500,000
7	0	0	2.0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>21 Unit dan 1 Bangunan</b>	<b>20,018,458</b>	<b>APBD</b>		<b>21 Unit dan 1 Bangunan</b>	<b>32,500,000</b>
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	Kec. Rasau Jaya	9 Unit	1,306,458	APBD		9 Unit	2,500,000
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	Kec. Rasau Jaya	12 Unit	8,712,000	APBD		12 Unit	15,000,000
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Kec. Rasau Jaya	1 Bangunan	10,000,000	APBD		1 Bangunan	15,000,000
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>100%</b>	<b>11,499,552</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>26,376,600</b>

						Masyarakat							
7	0 1	0 2	2.0 2			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>100%</b>	<b>2,296,222</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>
7	0 1	0 2	2.0 2	0 3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen yang disusun	Kec. Rasau Jaya	1 Dokumen	2,296,222	APBD	1 Dokumen	5,000,000
7	0 1	0 2	2.0 4			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>100%</b>	<b>9,203,330</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>21,376,600</b>
7	0 1	0 2	2.0 4	0 1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Kec. Rasau Jaya	4 Kali	1,700,000	APBD	4 Kali	3,400,000
7	0 1	0 2	2.0 4	0 2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Kec. Rasau Jaya	12 Bulan	1,488,300	APBD	12 Bulan	2,976,600
7	0 1	0 2	2.0 4	0 3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kec. Rasau Jaya	1 Kegiatan	6,015,030	APBD	1 Kegiatan	15,000,000
7	0 1	0 3				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>100%</b>	<b>28,040,680</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>37,000,000</b>
7	0 1	0 3	2.0 1			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>28,040,680</b>	<b>APBD</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>37,000,000</b>
7	0 1	0 3	2.0 1	0 1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	Kec. Rasau Jaya	1 Kegiatan	16,580,304	APBD	1 Kegiatan	22,000,000

7	0 1	0 3	2.0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	Kec. Rasau Jaya		1 Kegiatan	11,460,376	APBD		1 Kegiatan	15,000,000
7	0 1	0 4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>		<b>100%</b>	<b>41,700,994</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>50,000,000</b>
7	0 1	0 4	2.0 2		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Desa yang Dibina</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>		<b>6 Desa</b>	<b>41,700,994</b>	<b>APBD</b>		<b>6 Desa</b>	<b>50,000,000</b>
7	0 1	0 4	2.0 2	0 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	Kec. Rasau Jaya		96 kali	41,700,994	APBD		96 kali	50,000,000
7	0 1	0 5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>		<b>100%</b>	<b>14,892,078</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>40,000,000</b>
7	0 1	0 5	2.0 1		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>14,892,078</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>40,000,000</b>
7	0 1	0 5	2.0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Kec. Rasau Jaya		1 Kegiatan	14,892,078	APBD		1 Kegiatan	40,000,000

					Republik Indonesia									
7	0 1	0 6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>		<b>100%</b>	<b>158,008,656</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>189,050,000</b>
7	0 1	0 6	2.0 1		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang Dibina</b>	<b>Kec. Rasau Jaya</b>		<b>6 Desa</b>	<b>158,008,656</b>	<b>APBD</b>		<b>6 Desa</b>	<b>189,050,000</b>
7	0 1	0 6	2.0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Yang Dilaksanakan	Kec. Rasau Jaya		96 Kali	74,517,156	APBD		96 Kali	80,000,000
7	0 1	0 6	2.0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Yang Dilaksanakan	Kec. Rasau Jaya		6 Kali	2,100,000	APBD		6 Kali	4,200,000
7	0 1	0 6	2.0 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Yang Dilaksanakan	Kec. Rasau Jaya		96 Kali	40,170,750	APBD		96 Kali	57,750,000
7	0 1	0 6	2.0 1	1 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Yang Dilaksanakan	Kec. Rasau Jaya		3 Kali	1,050,000	APBD		3 Kali	2,100,000
7	0 1	0 6	2.0 1	1 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	Kec. Rasau Jaya		96 Kali	40,170,750	APBD		96 Kali	45,000,000
					<b>TOTAL</b>					<b>2,106,448,696</b>				<b>2,496,780,472</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 4.1**  
**Alokasi Anggaran Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022**  
**Kabupaten Kubu Raya**

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
7	01				<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,852,306,736</b>	APBD
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>40,714,112</b>	APBD
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,881,110	APBD
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,626,222	APBD
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,206,780	APBD
7	01	01	2.02		<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,477,087,751</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	1,472,539,362	APBD
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,251,222	APBD
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	1,297,167	APBD
7	01	01	2.03		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7,799,611</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,297,167	APBD
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3,251,222	APBD
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,251,222	APBD
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	<b>APBD</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	APBD
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	APBD
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153,559,636</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,548,436	APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,779,514	APBD
7	01	01	2.06	05	penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	10,580,686	APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratauran Perundang-undangan	1,460,000	APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93,191,000	APBD
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>46,000,000</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		APBD
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	5,000,000	APBD
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,000,000	APBD
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,000,000	APBD

7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107,127,168</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	19,200,000	APBD
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87,927,168	APBD
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20,018,458</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,306,458	APBD
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	8,712,000	APBD
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	APBD
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>11,499,552</b>	<b>APBD</b>
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2,296,222</b>	<b>APBD</b>
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,296,222	APBD
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>9,203,330</b>	<b>APBD</b>
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1,700,000	APBD
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1,488,300	APBD
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6,015,030	APBD
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>28,040,680</b>	<b>APBD</b>
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>28,040,680</b>	<b>APBD</b>
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,580,304	APBD
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11,460,376	APBD
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>41,700,994</b>	<b>APBD</b>
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>41,700,994</b>	<b>APBD</b>
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	41,700,994	APBD
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>14,892,078</b>	<b>APBD</b>
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>14,892,078</b>	<b>APBD</b>
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14,892,078	APBD
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>158,008,656</b>	<b>APBD</b>
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>158,008,656</b>	<b>APBD</b>
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	74,517,156	APBD
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,100,000	APBD

7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	40,170,750	APBD
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1,050,000	APBD
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	40,170,750	APBD
					<b>TOTAL</b>	<b>2,106,448,696</b>	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Kubu Raya. Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian

Rasau Jaya, Januari 2021

CAMAT RASAU JAYA



Drs. SUTOMO

Pembina Tk. I

NIP. 19640411 199103 1 011